BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Kekuatan Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari pesatnya perkembangan perindustrian di negara tersebut, karena perindustrtian merupakan faktor terbesar yang dapat membawa suatu negara kedalam suatu perekonomian yang kuat dan mapan. Suatu negara yang mayoritas pendapatannya bersumber dari industri yang biasanya kita sebut dengan negara industri, akan lebih siap menghadapi globalisasi di bidang ekonomi yang akan mengubah paradigma dunia kearah yang bebas tanpa batas. Globalisasi juga akan menuntut perusahaan-perusahaan industri untuk memiliki daya saing yang lebih kuat agar produk-produknya dapat bertahan di pasaran.

Sejalan dengan mutu peningkatan perekonomian di Indonesia dalam mengahadapi globalisasi ekonomi, Indonesia sebagai negara berkembang mulai menyiapkan diri untuk mengahadapi hal tersebut, diantaranya dengan peningkatan mutu sektor industri manufaktur yang terus menerus sehingga sedikit kemungkinan industri non manufaktur atau industri rakyat bisa berkembang.

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi khususnya sektor industri kerakyatan harus dilakukan atas dasar demokrasi ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan, yaitu dengan cara :

1. Meningkatkan minat, potensi, serta daya saing masyarakat dalam sektor tersebut.
2. Dapat menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang dengan baik
3. Mencegah persaingan yang tidak sehat serta melindungi pengusaha kecil sehingga tidak terjadi pengeksploitasian oleh pengusaha yang lebih kuat
4. Dapat memperkenalkan serta menjembatani peluang usaha kerakyatan dengan dunia luar agar sektor industri kerakyatan cepat berkembang

Kelemahan-kelemahan dalam sektor industri dapat berdampak pada pembangunan dalam bidang perdagangan, hal ini dapat dilihat dari panjangnya mata rantai distribusi perdagangan yang mengakibatkan ketidakefisienan, serta kurangnya sikap antisipasi terhadap perubahan lingkungan perdagangan internasional misalnya dengan adanya globalisasi ekonomi. Untuk menyikapi hal tersebut pemerintah memiliki suatu Instansi kelembagaan dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) yang bertugas menjembatani sektor perindustrtian dan perdagangan dengan dunia internasional.

Dengan dilatar belakangi permasalahan dan kondisi diatas yang mengemukakan betapa pentingnya peningkatan kualitas khususnya sektor industri dan perdagangan yang terkait dengan sumber pengalokasian dana pemerintah tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan memegang peranan yang penting dalam mengatasi permasalahan diatas.

Dalam kegiatan operasional perusahaannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) berperan sebagai fasilitator pihak produsen dalam memperkenalkan produk-produknya baik itu ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Selain itu juga DISPERINDAG harus mampu menciptakan iklim usaha yang mendorong peningkatan efisiensi dan perdagangan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong investasi dan produksi, serta peningkatan devisa dan pengendalian inflasi.

Kegiatan-kegiatan operasional tersebut tidak dapat terlepas dari alokasi sumber pembiayaan pemerintah Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagai suatu instansi kelembagaan milik pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak bisa seenaknya dalam mengajukan permohonan dan menggunakan dana pemerintah yang tersedia melainkan harus melalui serangakaian tata cara atau prosedur yang harus dilalaui sebagai proses tindak lanjut atas permohonan alokasi dana tersebut.

Secara garis besar, proses permohonan pengajuan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sampai dengan diterimanya alokasi dana melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Pengajuan Program dari tiap seksi kegiatan kepada Kepala seksi
2. Perumusan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)
3. Pengajuan pengesahan RASK kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

4. Setelah RASK disahkan maka diturunkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)
5. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai dengan DASK yang telah disahkan pada Biro Keuangan Daerah
6. Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang yang harus dipertanggung jawabkan (SPMU)
7. Alokasi dana dapat diambil pada Bank-bank yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini Bank Persepsi (Bank Jabar)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud melaksanakan kerja praktek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, dan untuk Laporan Kerja Praktek penulis mengambil judul " **TINJAUAN ATAS PERINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PER KODE REKENING (DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA)** "

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan yang ingin dicapai dalam kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur Dokumen Anggaran Satuan Kerja pada Dinas Perindustrtian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Seksi Ekspor Hasil Non Industri.
2. Untuk mengetahui Perincian penerimaan dan pengerluaran per kode rekening dalam suatu kegiatan khususnya pada Seksi Ekspor Hasil Non Industri.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Dengan adanya Kerja Praktek ini diharapkan akan mempunyai kegunaan, yaitu :

1. Bagi Penulis

   Kerja Praktek ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan melengkapi ilmu yang telah didapatkan selama berada di bangku kuliah, bisa lebih mengetahui bagaimana keadaan dunia kerja sebenarnya, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari Universitas Komputer Indonesia umumnya dan dari Jurusan Akuntansi pada khususnya.

2. Bagi Instansi

   Pelaksanaan Kerja Praktek ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai bahan masukan tambahan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan umumnya dan Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Seksi Ekspor Hasil Non Industri khususnya dalam hal pemikiran dan saran-saran dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi.

3. Bagi Pihak Lain

   Dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan atau bahan pertimbangan dan referensi dalam penyusunan laporan yang sejenis.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kerja Prekatek ini Metode yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

   Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai bahan bacaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendapatkan teori-teori yang diperlukan untuk pembahasan, kemudian dijadikan bahan perbandingan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Seksi Ekspor Hasil Non Industri.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

   Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung ke tempat objek yang akan diteliti. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

   a. Wawancara langsung (*Interview*), yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri, Kepala Seksi Ekspor Hasil Non Industri, Pimpinan Pelaksana Kegiatan dan juga Kasir Kegiatan Pengembangan Pemasaran Komoditas Ekspor Daerah Kab./Kota di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, dimana wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang tidak terdapat dalam laporan resmi atau manual guide yang dibuat oleh Dinas.

b. Pengamatan Langsung (*Observasi*), yaitu pengamatan langsung dengan cara mempelajari masalah pada objek penelitian.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data secara langsung dalam arti mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan guna untuk menambah data-data yang diperlukan yang tidak didapat dari wawancara langsung dan pengamatan langsung.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat Sub Dinas Perdagangan Luar Negeri Seksi Ekspor Hasil Non Industri, yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Bandung.

Adapun pelaksanaan Kerja Praktek ini dimulai tanggal 13 Agustus s.d 17 September 2003 yang dilaksanakan sesuai dengan hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at.